

BAB II

PERJALANAN SEJARAH TERRORISME DI INDONESIA DAN DUNIA

2.1 Perjalanan Wacana Terorisme

Peristiwa 11 September tersebar cepat di seluruh dunia. Berita menyebar langsung dari studio New York ke London, Roma, Moskow, Al Jazeera, Riyadh, Baghdad dan Kabul. Pada peristiwa 11 September ini, Al-Qaeda menjadi sorotan yang besar dalam cakupan di media massa Barat dengan berbagai ratusan cerita-cerita yang menyoroti kesedihan, penderitaan, kisah dari para korban dan keluarga mereka, pemerintahan Bush dan para pejabat publik mulai berspekulasi tentang penyebab dan akibat peristiwa 9/11 mengenai siapa dalangnya dan apa motif melakukan hal tersebut hingga ungkapan simpati dari para pemimpin dunia, beberapa bulan kemudian, peristiwa 11 September terus mempengaruhi hubungan internasional, kebijakan domestik dan opini publik. Momok operasi al-Qaeda yang membawa bentuk baru terorisme untuk dunia telah memicu perdebatan besar atas definisi teror, peran sosial dan politik, etika operasi kontra-terorisme, negara keterlibatan, bahaya masa depan kegiatan teroris, kegagalan demokrasi di negara-negara Timur Tengah, dan fundamentalisme agama.

Salah satu isu penting yang timbul dari peristiwa ini adalah peran dan efek dari liputan media massa mengenai pembungkian terorisme. Pasca 11 September para jurnalis mulai meliput mengenai berbagai macam *angle* pemberitaan mengenai Timur Tengah, Muslim-Amerika, Muslim - Arab di mana liputan berita tersebut dikaitkan dengan berbagai kasus terorisme yang terjadi hingga berujung pada penghancuran gedung WTC, tetapi dalam hal ini secara signifikan menimbulkan pertanyaan kepada kita mengenai seberapa jauh cakupan berita - berita yang di tayangkan dan dinikmati oleh *audience* ini memenuhi standart jurnalistik 'seimbang', 'kebenaran', 'objektivitas' kah mereka dalam kasus - kasus ekstrim konflik politik antara Amerika dan Timur Tengah.

"Sebelum kita dapat memahami maksud dan implikasi peristiwa bagaimana terorisme yang dibingkai oleh media massa dan sebelum kita dapat membedakan antara 'tujuan' indikator monitoring insiden terorisme

dan persepsi yang 'subjektif', kita perlu mendekonstruksi dan menjelaskan konsep dasar "terorisme." Konsep ini pada dasarnya diperebutkan, nilai-sarat dan terbuka untuk beberapa makna yang terletak di dalam bingkai budaya yang lebih luas, sehingga, sampai batas tertentu, terorisme adalah di mata yang melihatnya. Keputusan untuk label protagonis membentuk bagian dari pergumulan politik atas makna. Kelompok dapat dianggap sebagai "teroris" atau sebagai "gerakan pembebasan," "radikal aktivis," "bersenjata pemberontak", "gerilyawan", "diktator." (Norris:2002)

Terorisme diartikan di sini sebagai sistematis penggunaan intimidasi terhadap warga sipil untuk tujuan-tujuan politik. Konsep ini mengidentifikasi fenomena dengan teknik, target, dan tujuan; dan semua atribut ini dianggap sebagai diperlukan dan cukup untuk tindakan untuk memenuhi syarat sebagai terorisme. 'Teroris' adalah mereka yang menggunakan metode terorisme.

" Terorisme adalah metode atau taktik yang melibatkan sistematis koersif intimidasi, termasuk ancaman atau penggunaan kekerasan dalam penghancuran properti atau fisik orang-orang yang digunakan sebagai mekanisme kontrol. Proses ini dicontohkan oleh penggunaan sabotase, merusak kerusakan, pembajakan, pembunuhan, penculikan, pembakaran, penyiksaan, pemerkosaan, bom, dan melanggar hukum penjara yang dirancang untuk menanamkan rasa takut, ketidakamanan dan cemas di antara populasi target." (Norris:2002).

Seorang politisi Amerika Serikat bernama Samuel P. Huntington berperan dalam mengkonstruksi wacana Islam. Dia membaca pertarungan politik antar negara setelah perang dingin. Para teoritis beargumen bahwa pertarungan ideologi antar negara dalam perang dingin meliputi hak asasi, demokrasi liberal dan ekonomi global/pasar bebas. Dan salah satu pemikir Francis Fukuyama berpendapat bahwa dunia sudah mengalami akhir dari sejarah yang mengakhiri perang dingin dan dimulainya masa Post Cold War. Huntington dalam bukunya *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order* (1996), menjelaskan masa perang ideologi telah berakhir dan dunia mengalami babak baru yaitu pertarungan kebudayaan. Dia berpendapat bahwa penyulut utama konflik di masa depan adalah dalam garis kebudayaan dan

agama. Kebudayaan dunia yang dia maksud antara lain Western, Amerika Latin, Orthodox, Eastern World dan Moslem World. Moslem world. Moslem World merupakan dunia Islam atau negara-negara Islam yang meliputi negara timur tengah, Afrika Barat, Albania, Bangladesh, Brunei, Comoros, Indonesia, Malaysia, Pakistan, and Maldives. Negara-negara tersebut adalah negara yang berpotensi menyulut konflik dunia yang berbasis kultural.

Serangan 11 September menjadi titik balik dalam lingkungan keamanan umum di dunia. Serangan tersebut memiliki makna simbolis: di jantung Barat (New York dan Washington) dan dilakukan oleh fundamentalis Islam. Delapan belas dari sembilan belas teroris berasal dari Arab Saudi, mendapatkan misi mereka dari Al-Qaeda di Afghanistan, yang di mana mereka tinggal dan belajar di Jerman dan, akhirnya, melakukan serangan mereka di AS. Dalam berminggu - minggu setelah serangan tersebut, Arab Saudi menyangkal fakta bahwa teroris tersebut adalah warga Arab Saudi atau lahir dan besar di kerajaan tersebut.

Serangan teroris pada 11 September 2001 adalah peristiwa yang secara tidak langsung menyimbolkan serangan Islam terhadap negara Amerika Serikat. Hal ini tersebut terjadi karena asal warga negara para teroris yang berasal dari negara-negara Islam yaitu Afghanistan dan Arab Saudi. Al-Qaeda juga merupakan organisasi Islam yang berasal dari negara timur tengah. Menurut Huntington, Afghanistan dan Arab Saudi termasuk dalam kategori dunia Islam sedangkan Amerika Serikat termasuk ke dalam kategori Western. Dan ketika peristiwa 11 september terjadi maka konflik tersebut langsung mengarah kepada konflik Islam dan barat.

Konstruksi wacana Islam sebagai teroris kemudian menjadi wacana global. Wacana tersebutlah yang membenarkan serangan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap negara-negara Islam, Afghanistan dan Irak, atas nama pembasmian para teroris. Wacana ini kemudian menjadikan Islam sebuah identitas yang dimarjinalkan, berdasarkan alasan bahwa para teroris berasal dari organisasi Islam maka seluruh umat Islam mendapatkan imbas identitas sebagai teroris yang berbahaya. Padahal dinamika orang-orang Islam dalam memandang serangan teroris tersebut ada yang pro dan kontra tetapi wacana global telah mengeneralkan identitas Islam sebagai teroris yang memicu konflik peradaban dunia.

Wacana global tentang Islam sebagai teroris juga berpengaruh di Indonesia. Peristiwa bom bali yang terjadi dua kali pada tahun 2002 dan 2005 menjadikan isu terorisme Islam semakin menguat. Peristiwa pertama hanya berselang waktu satu tahun dari tragedi 11 september 2001 yang menyerang Amerika Serikat. Isu hangat dari peristiwa serangan kepada

Amerika tersebut langsung menyeruak di masyarakat Indonesia dalam memandang peristiwa bom Bali. Teroris Islam kembali beraksi dan yang menjadi sasarannya adalah Indonesia. Bali yang menjadi pulau wisata internasional menjadi target bom yang menelan ratusan korban dari warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Peristiwa bom Bali dipandang sebagai aksi terorisme yang mempunyai kaitan dengan aksi terorisme di Amerika Serikat. Daftar tersangka kasus bom Bali seperti Imam Samudra ditengarai mengikuti organisasi Islam dunia. Target serangan bom Bali adalah turis-turis yang sedang berlibur dan bersenang senang di Bali. Terbukti dengan lokasi pusat bom Bali pertama yaitu Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali. Tempat- tempat tersebut adalah klub-klub malam yang ramai dengan turis. Ledakan terakhir dalam bom Bali pertama adalah di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat. Ledakan kali ini membawa wacana tentang Islam yang semakin menguat, yaitu serangan Islam atas negara Barat khususnya Amerika Serikat, dengan terjadinya dua kali peristiwa pengeboman di bali, menjadikan pandangan dunia bahwa Indonesia adalah sarang teroris sekaligus juga target terorisme. Peristiwa pengebomana yang terjadi pada tahun 2002 dan tahun 2005 ini di Indonesia menjadikan peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia, sebelumnya pandangan dunia mengenai bali adalah sebuah pulau dewata yang indah, eksotik, penuh dengan kehangatan, kuat akan budaya, dan aman menjadi wacana yang negatif mengenai Indonesia.

Islam, terorisme dan bom bunuh diri adalah tiga unsur yang utuh dan melekat dalam wacana identitas Islam. Islam bukan lagi dianggap sebagai agama yang menentramkan kehidupan tetapi dianggap agama yang menakutkan. Wacana tersebut membuat Islam seakan - akan adalah gerakan berbahaya yang menjadi musuh bersama warga dunia, sehingga membuat mereka yang tinggal di daerah - daerah minoritas agama Islam menjadikan Muslim sebagai ancaman bagi sekitarnya, di Indonesia, wacana tersebut adalah wacana dominan. Pemerintah Indonesia juga melakukan aksi pembasmian teroris yang juga disebut sebagai musuh negara. Dengan dibentuknya pasukan khusus militer yaitu Densus 88. Pasukan tersebut adalah pasukan khusus yang menangani masalah terorisme di Indonesia.

" Media adalah mekanisme prinsip yang komunikasi itu disebarkan, tetapi itu lebih dari sekadar menjadi saluran pasif untuk menyampaikan pesan. Media adalah aktor politik dalam dirinya sendiri dan mampu memainkan sejumlah peran politik, yang meliputi agen stabilitas, agen pengekangan agen perubahan (McCargo 2003). "

Hari ini dalam negara-negara di seluruh Asia, berbagai bentuk organisasi yang berbeda bertransaksi pesannya melalui media massa, hal ini termasuk gerakan-gerakan separatis yang didorong oleh berbagai faktor etnis, nasionalis dan agama ataupun kelompok revolusioner yang berusaha untuk menumbangkan kedaulatan negara. Penyebaran informasi oleh pemerintah melalui media yang digunakan untuk menjadi landasan pembangunan bangsa dan politik. Tindakan terorisme dan kekerasan politik adalah kisah komunikasi yang tidak berakhir hanya dalam diri tetapi bagian dari proses yang lebih luas untuk mengkomunikasikan pesan dan membangkitkan respon yang diinginkan.

" Kekerasan yang berfungsi sebagai kunci universal fokus media perhatian dan mendapatkan publisitas (Nacos: 2002) "

Bagi mereka yang terlibat, kekerasan digunakan untuk mendapatkan perhatian yang dari elite politik, kebijakan, pemicu untuk membuat orang memperdebatkan tentang tujuan mereka, sehingga membuat para media mulai mengatur agendanya untuk memberitakan hal ini, media mungkin mencari sensasi untuk meningkatkan peringkat mereka, tetapi juga memiliki kepentingan dalam mengatur arusnya informasi dalam negaranya. Media juga memiliki hubungan erat dengan aktor-aktor lainnya, seperti kepentingan politik dan bisnis, dan pemiliknya. Oleh karena itu kombatan non-negara mungkin mampu mengatur agenda media melalui menggunakan kekerasan, tetapi hal ini tidak selalu memberi mereka pengaruh atas isi media output.

Publisitas dapat diarahkan di berbagai khalayak untuk sejumlah tujuan. Pada satu tingkat, kekerasan dapat dimaksudkan untuk mengintimidasi opini publik dan elit politik untuk mendatangkan suatu respon. Di sisi lain, kelompok perlunya eksistensi untuk merekrut anggota dan membangun dukungan politik. Al - Qaeda menggunakan media dengan cara ini, di mana menggunakan kekerasan untuk memikat para media untuk mengatur agenda pemberitaannya, dan terus menyorot aksinya sehingga membuat ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat.

Elemen kunci dalam proses komunikasi adalah bagaimana media membantu untuk bentuk persepsi publik mengenai para teroris dan kekerasan yang mereka lakukan. Meskipun label dan definisi yang melekat pada kelompok individu yang terlibat kekerasan, umumnya label seperti 'teroris', 'pemberontak', 'revolusioner', atau bahkan 'perompak' umum digunakan untuk menggambarkan kelompok - kelompok yang terlibat konflik dalam suatu negara, tetapi

setelah terjadinya peristiwa 9/11 ada sebuah istilah baru yang ditawarkan oleh media bagi kegiatan terrorisme yang terjadi di dunia ' Islam terrorism '.

Selama dekade terakhir munculnya baru media komunikasi di Asia, khususnya internet, menambahkan dimensi baru untuk peran media. Salah satu keuntungan utama dari internet adalah bahwa ia menawarkan mengkomunikasikan pesan mereka kapan saja, dan bagaimana pun pesannya, karena dalam media internet sendiri, kita dapat bebas melewati *gate keeper* , karena kita sendirilah yang menjadi peran *gate keeper*. Akibatnya, secara luas diyakini bahwa media baru adalah aktor kritis dalam memfasilitasi perubahan sosial dan politik di negara-negara di seluruh Asia. Media baru menawarkan kesempatan yang lebih besar membawa orang bersama-sama, menghasut kekerasan dan melegitimasi perjuangan mereka untuk *audiens* yang lebih luas. Militan yang menggunakan internet sebagai akses informasinya telah meningkat selama dekade terakhir, sejak perang di Afghanistan pada tahun 2001-2002, Al- Qaeda semakin berfokus berkomunikasi melalui internet, Al Qaeda menggunakan website untuk perdebatan umum dan untuk menyebarkan ideologi, dalam beberapa kasus, pesan yang dikeluarkan untuk menetapkan tujuan strategis yang luas atau menargetkan daftar tempat-tempat dan orang-orang.

2.2 Media Amerika

Pasca terjadinya peristiwa 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat, banyak dari pemberitaan melaporkan segera setelahnya bahwa pelakunya adalah orang Arab dan Muslim. hal ini sama hal dengannya ketika sebuah serangan bom yang menghancurkan gedung Federal Alfred P. Murrah di Oklahoma City pada tanggal 19 April 1995, FBI dan pemberitaan dengan cepat mengidentifikasi orang - orang timur tengah sebagai tersangka, hingga dalam beberapa jam setelah kejadian tersebut, mereka orang Arab, dan Muslim - Amerika menjadi sasaran fisik dan verbal oleh masyarakat setempat, dan ternyata pelaku dari peristiwa tersebut adalah seorang warga Amerika yang bernama Timothy McVeigh seorang mantan prajurit berusia 27 tahun.

" Mengapa orang Arab dan Muslim yang menjadi korban dari pemberitaan media pasca terjadinya peristiwa pengeboman, hal tersebut terjadi bahwa banyak orang yang melihat citra dari arab melalui televisi dan film yang digambarkan oleh hollywood, di mana mereka dicitrakan sebagai orang yang melakukan pengeboman bunuh diri, orang - orang yang fanatik dan malas. (Pippa and Montague 2003 : 134) "

" Sekitar 55 tahun yang lalu, sebelum munculnya televisi, Walter Lippmann mengamati bahwa apa yang orang tahu tentang dunia di sekitar mereka sebagian besar merupakan hasil dari pengetahuan yang diterima melalui pers dan gambar " Picture in our head " adalah hasil dari sebuah Pseudo-reality tercermin dalam berita. (Pippa and Montague 2003 : 135) . "

Dalam masyarakat massal hari ini, orang-orang bahkan lebih bergantung pada berita karena mereka tidak memiliki tempat lain untuk mencari informasi tentang urusan publik dan pada saat ini sangatlah mudah untuk mengakses sebuah informasi, baik itu menggunakan televisi, radio, ataupun media baru (internet), dalam sepuluh tahun terakhir, media AS telah dikendalikan oleh 50 perusahaan yang bersaing satu sama lain , banyak dari lembaga-lembaga media tersebut melakukan konglomerasi media satu sama lain, di mana jurnalisme adalah bisnis inti mereka.

Wartawan, editor, produser, dan pihak lain di media berita membuat keputusan terus-menerus tentang apa dan siapa yang akan hadir dalam berita dan bagaimana; Pilihan tersebut dipengaruhi oleh prosedur operasi standar organisasi mereka.

"sumber dan sudut pandang 'diindeks' (diterima melalui gerbang berita) sesuai dengan besarnya dan kandungan konflik di antara pengambil keputusan utama pemerintah atau pemain lain yang memiliki kekuatan (seperti yang dirasakan oleh orang dalam jurnalistik) kepada Bennett. Mempengaruhi perkembangan sebuah cerita (Bennett:1996)."

Pers mencakup suara kritis dan sudut pandang kepentingan yang kurang lebih ditentukan tergantung pada posisi tertentu dari sumber otoritatif, terutama pihak pemerintah. Karena "pengindeksan" telah terbukti paling kuat dalam berita asing, orang bertanya-tanya apakah hal itu mempengaruhi liputan orang-orang Amerika Muslim dalam menghadapi masalah Timur Tengah antara orang Israel dan Palestina dan dukungan tradisional pemerintah A.S. untuk Israel. Kern mengungkapkan bahwa terdapat dua dimensi dalam mengemukakan berita asing , yaitu: berita asing yang berhubungan dengan peristiwa di luar negeri dan kisah dalam negeri yang berkonsentrasi pada peran dan reaksi Amerika Serikat terhadap peristiwa dunia (Kern:198). Demikian pula, cakupan domestik juga memiliki dua dimensi: yang berkonsentrasi pada minoritas etnis dan agama di Amerika (yaitu Muslim-Amerika dan Arab-

Amerika) dan satu lagi yang berkonsentrasi pada hubungan mereka dengan daerah asal mereka (Timur Tengah).

Peristiwa 9/11 memberitahukan kepada para *audience* televisi diseluruh dunia bahwa agama masih merupakan sesuatu kekuatan yang patut diperhitungkan dan media, akan tetapi menjadi pengawal untuk meliput setiap berita buruk dan mengerikan. Ini berarti selama media modern bekerja sesuai dengan standarnya sendiri, seperti kata pepatah lama “ berita baik adalah berita buruk, dan berita buruk adalah berita baik”.

Dalam *Practicing Religion in the Age of Media* Hoover berargumen bahwa
“ Sebagian besar hal yang terjadi dalam hubungan antar agama dan media melibatkan keterkaitan berlapis antara symbol agama, kepentingan, makna, dan lingkungan media modern tempat memperkenalkan budaya terkini (**Hoover 2002**)

2.2.1 Media Amerika Pasca Peristiwa 9/11

Dalam bukunya yang berjudul *Television Culture : Popular Pleasures and Politics* (1987). John Fiske berargumen bahwa televisi adalah suara “ agen budaya “, yang berfungsi sebagai “ pemancing dan penyebab makna – makna”. Ia mengatakan bahwa kebudayaan berkaitan dengan makna dan kesenangan : kebudayaan kita terdiri dari makna – makna yang kita buat atas pengalaman sosial dan atas relasi sosial kita, dan oleh karena itu kebudayaan adalah arti yang kita punyai atas “ diri “ kita sendiri. Kebudayaan juga menempatkan makna – makna itu di dalam system sosial, karena suatu system sosial hanya dapat dipertahankan oleh makna – makna yang dibuat manusia untuknya. Kebudayaan terukir secara mendalam di dalam distribusi kekuasaan bertingkat di dalam masyarakat, karena relasi kekuasaan hanya dapat distabilkan atau digoyahkan oleh makna – makna yang dibuat manusia untuknya. Kebudayaan adalah perjuangan untuk makna – makna sebagaimana masyarakat adalah suatu perjuangan untuk kekuasaan (Fiske, 1987)

“ Agama dan televisi dimediasi oleh makna kultural yang diproyeksikan ke layar dan dikendalikan oleh para Gate Keepers yang bertugas sebagai agen “ ideologi dominan”. Lebih lanjut Fiske mengatakan bahwa televisi “ dibuat tampak sebagai hasil dari proses alamiah ketimbang kultural, ia dijauhkan dari ranah sejarah dan

kebudayaan dan di geser ke arah kebenaran universal sehingga televisi menghasilkan ‘realitas’ .”

Enam bulan pasca kejadian tersebut televisi di Amerika terus menerus menampilkan ‘realitas’ yang dibuat oleh televisi mengenai pemberitaan 9/11, baik itu bagaimana terjadinya peristiwa tersebut, bagaimana jaringan al – qaeda itu sendiri, hingga pemimpin dari peristiwa tersebut yaitu Osama bin Laden, yang menarik dari hal ini media – media di Amerika bukan hanya menyoroti mengenai kejadian tersebut tetapi mereka semua mencoba mencari ‘ orang ketiga ‘ dari terjadinya peristiwa 9/11, hal tersebut dapat kita lihat dari table dibawah.

Table B.1 The Amount of News Coverage of Muslim-Americans and Arab-Americans before and after September 11, 2001

	SEPT. 11, 2000 TO MARCH 11, 2001 (6 MONTHS) (N)	MARCH 12, 2001 TO SEPT. 11, 2001 (6 MONTHS) (N)	SEPT. 12, 2001 TO MARCH 11, 2002 (6 MONTHS) (N)
<i>New York Times</i>	37	17	376
<i>New York Post</i>	58	15	50
<i>Daily News (NY)</i>	52	21	99
<i>USA Today</i>	8	6	128
Total:	155	59	653

Secara signifikan pasca terjadinya peristiwa tersebut, berita yang dilaporkan diseluruh media Amerika menyebutkan mengenai Muslim – Amerika dan Arab – Amerika, padahal enam bulan sebelum peristiwa tersebut media hanya sekitar belasan memberikan mengenai Muslim – Amerika dan Arab – Amerika, tetapi pasca kejadian tersebut seperti yang kita lihat pada data di atas, mengalami kenaikan hingga ratusan mengenai berita yang menyebutkan Muslim – Amerika dan Arab – Amerika , 70 persen cerita sepenuhnya ditujukan untuk agama yang menyangkut Islam dan Islam dan 30 persen sisanya berhubungan dengan agama Kristen dan Kristen, Yudaisme dan Yahudi, non-denominasional, dan Buddhisme dan Budha.

Lonjakan ini merupakan reaksi alami terhadap serangan yang menewaskan lebih dari 3.000 orang Amerika dan dilakukan oleh pengikut Muslim dan Arab Amerika Paling dicari yaitu pemimpin teroris, Osama bin Laden. Tetapi perhatian media bukan lah mengarah kepada Osama Bin Laden selaku pelaku dari peristiwa tersebut tetapi media mengarahkan

pemberitaannya mendadak Muslim dan Arab dan agama Islam, seakan mereka menjadi kambing hitam dari peristiwanya tersebut.

2.3 Media Indonesia

Saat Rezim Soeharto , televisi dimanfaatkan secara efektif sebagai bagian dari mekanisme untuk kekuasaan, sambil menjauhkan para pengkritik dan oposisi dengan mengendalikan informasi, dan memusatkan pembangunana di seluruh Indonesia. Pesan harapan, optimism dan dukungan kepada negara yang sedang membangun adalah arus utama penyiaran televisi negara dengan meniadakan segala bentuk celaan terhadap rezim atau system bagian tak terpisahkan dari apa yang kemudian dikenal sebagai “ jurnalisme pembangunan “.

Selama Orde Baru, agama seperti banyak hal lainnya di kenalikan secara ketat .Pancasila, sebagai sebagai ideologi resmi negara lebih diutamakan dari segala hal lainnya. Tetapi pasca protes keras mahasiswa di seluruh negeri dan tekanan public yang besar pada tauhn 1998, Soeharto lengser sebagai Presiden Indonesia, yang mengakhiri periode panjang otoritarianisme yang berkepanjangan, yang di mana kala itu menghambat industry penyiaran melalui berbagai cara monopoli, perizinan media dan sensor pemerintah. Demokrasi yang datang pasca lengsernya Seoharto, memunculkan fenomena baru sebagai akibat terlalu liberalnya media dalam penyampaian informasi. Hal tersebut menghapuskan pembatas yang lama dipaksakan oleh rezim Soeharto, sehingga pasca era tersebut, Islam di Indonesia mulai menjadi sebuah bahan komodifikasi.

2.3.1 Ledakan Media Pasca tahun 1999

Pada tanggal 13 September 1999, pada hari-hari terakhir pemerintahan Habibie 17 bulan, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Pers 21 pasal 1999, Membatalkan Undang-Undang Pers 1966 dan 1982 yang dibuat di bawah Presiden Soeharto yang sudah lama dan mengantarkan periode kebebasan pers yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.

Lingkungan media yang dihasilkan dapat disamakan dengan yang muncul sebentar di Thailand pada tahun 1973, setelah digulingkannya kediktatoran militer di Lapangan Marsekal Thanom Kittikachorn. Seperti di Thailand, Indonesia mengalami ledakan media . Ada cetakan

koran baru, stasiun radio baru dan puluhan lokal stasiun televisi, termasuk empat televisi nasional baru. Populasi terbesar keempat di dunia, tiba – tiba bebas akan arus informasi, membaca, mengamati dan memicu ledakan media

Menurut Aliansi Pers Asia Tenggara (SEAPA), pada akhir tahun 1999, ada sekitar 299 surat kabar, 886 tabloid, 491 majalah, 11 buletin, 12 stasiun TV dan 1.110 stasiun radio. Namun, meski terlihat jelas kesehatannya akan industri media, ada kekhawatiran tentang industry ini . Pada saat itu para elit Indonesia jelas tidak nyaman dengan apa yang mereka anggap terlalu bebas (Industri Media). Mayor Jenderal Sudrajat, penasihat media untuk kemudian Presiden Megawati, berbicara di Newsworld Asia pada bulan Juli 2002, mengungkapkan keprihatinannya atas kebebasan media. Sudrajat menjelaskan bahwa perubahan teknologi membuat media semakin sulit kontrol. Dia berpendapat bahwa kurangnya kedewasaannya berdampak tidak baik pada Reputasi negara. menurutnya, 'Media perlu lebih profesional',

2.3.2 Konglomerasi Media

Media sebagai suatu realitas dan bagian dari kehidupan modern banyak memberi manfaat. Namun, media bukanlah suatu wahana yang netral. Kehadirannya tidak selalu diperlakukan dengan pola – pola realasi yang sederhana. Media bisa menjadi wahana untuk mendominasi, menguasai, mengarahkan pikiran public, merekonstruksikan realitas, dan menanamkan ideology. Dalam kasus Indonesia, Misalnya, media pernah menjadi alat di tangan pemerintah untuk mendominasi jagat wacana. Media menjadi alat untuk melegitimasi eksistensi dan struktur kekuasaan politik dan ekonomi. Dalam media yang pengaturannya di tentukan oleh pemerintah yang otoriter, biasanya wacana yang berseberangan dan mengancam kekuasaan tidak diberi ruang.

Dalam sepuluh tahun terakhir, bangsa Indonesia merayakan kebebasan bermedia dengan mucnulnya berbagai penerbitan pers dan televise. Siapa pun berkesempatan mendirikan media dan memproduksi wacana kepentingannya, baik kepentingan ideology, modal, partai politik, maupun komunitas.

Media-media besar di Indonesia saat ini kebanyakan merupakan kepemilikan privat dengan pemegang saham mayoritas bahkan beberapa media malah tergabung dalam sebuah Group perusahaan yang sama. Misalnya MNC Group (RCTI, MNC TV dan Global TV) milik Harry Tanoe, Trans Corp (Trans TV dan Trans7) milik Chairil Tanjung serta VIVANews (TV

One dan ANTV) milik Aburizal Bakrie. Para pemilik dan pemegang saham di grup-grup media tersebut bukan hanya sekedar pebisnis tetapi juga politikus atau paling tidak berafiliasi dengan partai politik atau elit-elit tertentu. Banyak yang menilai pemberitaan di media dipengaruhi oleh kebijakan pemegang saham dan kepentingan perusahaan serta orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap media. Oleh sebab itu independensi media saat ini patut dipertanyakan.

Kepentingan politik dan korporasi ini menyebabkan banyaknya program atau tayangan yang terkesan dipaksakan atau dibuat-buat. Hal tersebut cenderung berpotensi merugikan publik karena lama-lama masyarakat akan menjadi jenuh. Jika hal tersebut terjadi maka fungsi media sebagai tempat informasi dan edukasi, dikarenakan adanya letak kekuasaan yang menyebar dalam pengendalian berita maupun isi dari berita tersebut.

Dalam pemikiran Foucault, kekuasaan mempunyai hubungan yang erat dengan pengetahuan. Kekuasaan dalam pemikiran Foucault bukanlah pertama-tama persoalan institusi, struktur sosial yang mengikat masyarakat melainkan arti dari struktur sosial dan institusi yang memiliki kekuatan strategis. Kekuasaan tidak melulu negatif dan represif. Kekuasaan justru beroperasi secara positif dan produktif sebab kekuasaan selalu menciptakan pengetahuan yang pada gilirannya memunculkan suatu kebenarannya sendiri. Pengetahuan menyokong kekuasaan, kekuasaan menopang pengetahuan. Foucault termanifestasi antara lain melalui wacana sosial yang dibuat. Karena itu suatu kekuasaan terselenggara melalui terciptanya suatu wacana sosial. Bahkan, kekuasaan merupakan bagian yang melekat atau inheren dengan seluruh struktur wacana. Artinya, dalam suatu wacana terdapat kekuasaan. Wacana dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan.

Relasi antara kekuasaan dan pengetahuan mengubah hakikat kekuasaan itu sendiri menjadi kekuasaan yang produktif / kreatif dan bukannya represif. Jadi, kekuasaan merupakan sumber pengetahuan yang pada gilirannya memperkuat kekuasaan demi tujuan yang strategis. Menurut Foucault, kekuasaan harus dilukiskan secara lebih positif. Kekuasaan tidak bisa disamakan begitu saja dengan tindakan represif, sensor, manipulative, penyelewengan, dan lain sebagainya. Sebab kekuasaan itu pada hakikatnya memiliki kemampuan produktif dan strategis dalam kehidupan sehari-hari. Kekuasaan mempunyai pengaruh positif terhadap kehidupan manusia, baik secara perorangan maupun secara kolektif.

Konglomerasi media merupakan kekuatan dari perusahaan yang berskala besar dalam memiliki banyak dan jenis media massa sebagai bagian bisnisnya. Bentuk konglomerasi ini tentunya sudah terjadi di Indonesia, Sebut saja MNC GROUP, di mana ia memiliki RCTI, MNC TV, Global Tv, dan masih banyak lainnya. Indonesia sendiri, peristiwa konglomerasi media sudah terjadi ketika Chairul Tanjung, yang mengakuISiSi trans 7, di mana yang

sebelumnya bernama Tv 7, yang kemudian di susul oleh beberapa nama seperti Aburizal Bakrie dengan Viva Groupnya, Hary Tanoë dengan MNC groupnya.

Akibat media yang tergabung dalam satu group tertentu maka berita dan informasi yang disampaikan akan homogen. Selain itu berita yang disampaikan hanya berita yang dianggap menguntungkan secara ekonomi. Akhirnya Pers tidak lagi dinilai dari seberapa besar nilai berita yang ada, tetapi berapa banyak keuntungan yang akan didapatkan dari pemuatan berita tersebut. Sebetulnya ini merupakan tanda-tanda bahwa regulasi atau peraturan yang mengatur tentang kepemilikan media tidak berjalan dengan baik. Padahal konglomerasi media berbahaya

Ini jelas-jelas menjadi kekhawatiran bagi kita semua, Munculnya kekhawatiran itu bukanlah tanpa alasan. Dalam sistem demokrasi, media massa dapat menjadi kekuatan sosial yang menjalankan fungsi pengawasan sosial jika dikelola dengan prinsip-prinsip jurnalisme yang ketat. Namun, besar pula kemungkinan media massa menjadi kekuatan yang mengabdikan kepada kepentingan ideologi politik modal yang menggerakannya sekaligus tunduk pada mekanisme pasar guna menggapai keuntungan yang maksimum. Dalam konteks itu, konglomerasi media massa di Indonesia memperlihatkan bagaimana media massa didominasi oleh kepentingan politik pemiliknya sekaligus menjadi instrumen bisnis meraup keuntungan melalui komodifikasi informasi dalam pasar yang oligopolistik. Ini sudah sampai pada mengancam kebebasan pers dalam menyampaikan berita. Sebagai contoh saya pernah membaca “adu comment” salah seorang pers bersama seorang mahasiswa yang berkomentar pedas akan kemunculan berita pada sebuah media massa online yang tidak sesuai dengan faktanya, terang-terangan salah seorang pers tersebut menerangkan bahwa mereka tidak akan mendapatkan “uang” jika mereka tidak pro terhadap pemerintah bahkan pemerintah tak segan-segan untuk menutup perusahaan media massa tersebut jika masih saja mempublikasikan pemberitaan miring seputar pemerintah. Amat disayangkan sekali, tanpa sadar kita telah didoktrinasi oleh berbagai macam pemberitaan yang hanya memilih untuk menguntungkan nama dari beberapa pihak yang dianggapnya mempunyai peranan penting bagi keberhasilannya media massa.

Kepemilikan berbagai macam perusahaan media massa, baik cetak, online, maupun elektronik, oleh satu konglomerat tertentu diyakini membatasi hak publik dalam memperoleh keberagaman informasi, pemberitaan, dan pandangan, yang sangat diperlukan dalam konteks berdemokrasi, tidak dapat dipungkiri banyak orang saat ini mengincar kekuasaan di kursi-kursi pemerintahan dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, begitu juga halnya para pemilik media. Mereka juga masuk dalam jajaran nama calon yang akan menjadi wakil-wakil rakyat.

Uniknya, mereka menggunakan media yang mereka pimpin sebagai alat untuk mengkampanyekan dirinya. Semakin banyak media yang mereka punya, maka semakin banyak berita-berita yang menggambarkan tentang para pemilik media tersebut. Hal ini membuat media tidak lagi netral, namun berdasarkan masing-masing kepentingan pemiliknya.

Sebut saja misalnya dalam hal ini Trans7 dan Trans TV berada pada payung bisnis yang sama yakni Trans Corp yang dikuasai oleh Chairul Tanjung. Global TV, RCTI dan MNC TV bergabung dalam MNC Group dan bertindak selaku pemilik di Indonesia adalah Hary Tanoesoedibyo. TV One dan ANTV bernaung di bawah bendera Bakrie

Group dengan Bos utama Abu Rizal bakrie. SCTV yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Eddy Sariatmadja berada pada lingkaran Surya Citra Media. Serta yang terakhir Metro TV dengan Surya Paloh sebagai pemimpinnya yang termasyhur karena wajahnya sering ditampilkan oleh TV yang dimilikinya sendiri.

Sebagai contoh televisi yang ada di Indonesia yaitu Tv One dan Metro Tv. Saat pemberitaan kasus lumpur yang terjadi di Sidoarjo, Tv One memberitakan lumpur tersebut dengan menyebut Lumpu Sidoarjo, sedangkan Metro Tv menyebut kasus tersebut sebagai Lumpur Lapindo. Perbedaan penyebutan kata ini bukanlah semata-mata perbedaan biasa. Hal ini terjadi karena perbedaan kepemilikan. Tv One di miliki oleh perusahaan Bakrie Group sehingga tidak mungkin dalam Tv yang dimilikinya mengatakan bahwa lumpur tersebut terjadi akibat anak perusahaannya yaitu Lapindo Brantas. Sedangkan Metro Tv begitu blak-blakan membuka kasus ini dikarenakan Metro Tv tidak ada urusan dengan kasus tersebut. Bahkan Metro Tv menilai bahwa Lapindo Brantas yang merupakan perusahaan Bakrie tersebut ikut berkontribusi sehingga lumpur tersebut muncul dan menenggelamkan sebagian daerah di Sidoarjo.

Potensi konflik kepentingan dalam konglomerasi media massa ini secara faktual dapat dilihat dari munculnya sikap media massa yang cenderung partisan dan tidak netral dalam pemberitaan. Meski secara formal media massa di Indonesia seperti MNC Group, Bakrie Group maupun Media Group tidak pernah menyatakan bahwa mereka memiliki hubungan afiliasif maupun partisan terhadap kekuatan politik. Namun relasi antara pemilik modal yang merangkap politisi membuat para pengelola media massa tidak bisa netral dari kepentingan politik pemilik modalnya. Sehingga konflik kepentingan antara media massa yang harus tunduk pada kaidah-kaidah jurnalistik dalam menyajikan informasi kepada publik dengan kepentingan politik dari pemilik media tersebut menjadi tidak terhindarkan.

2.3.3 Media Menjadi Alat Propaganda

Kontrol informasi pada media Indonesia adalah pusat untuk mempertahankan kekuasaan Suharto pada saat itu, bagaimana Soeharto dan media Indonesia kala itu hanya memberitakan kebaikan yang dilakukan oleh Soeharto dan hanya memberitakan mengenai bagaimana pemerintahan Indonesia berjalan dengan baik, tanpa ada kritik sama sekali, dan radio telah menjadi sebuah alat orator Suharto.

Pada awal era orde baru, yang menjanjikan keterbukaan, sejumlah koran menjadi korban, antara lain majalah *Sendi* terjerat delik pers, pada 1972, karena memuat tulisan yang dianggap menghina Kepala Negara dan keluarga. Surat ijin terbit *Sendi* dicabut, pemimpin redaksi-nya dituntut di pengadilan. Setahun kemudian, 1973, *Sinar Harapan*, dilarang terbit seminggu karena dianggap membocorkan rahasia negara akibat menyiarkan Rencana Anggaran Belanja yang belum dibicarakan di parlemen, Pada 1974, setelah meledak Persitiwa Malari, sebanyak 12 penerbitan pers dibredel, melalui pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT). Pers dituduh telah “menjurus ke arah usaha-usaha melemahkan sendi-sendi kehidupan nasional, dengan mengobarkan isu-isu seperti modal asing, korupsi, dwi fungsi, kebobrokan aparat pemerintah, pertarungan tingkat tinggi; merusak kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan nasional; menghasut rakyat untuk bergerak mengganggu ketertiban dan keamanan negara; menciptakan peluang untuk memantapkan situasi yang menjurus pada perbuatan makar.”

Pencabutan SIT ini dipertegas dengan pencabutan Surat Ijin Cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh Laksus Kopkamtib Jaya. Pemberangusan terhadap pers kembali terjadi pada 1978, berkaitan dengan maraknya aksi mahasiswa menentang pencalonan Soeharto sebagai presiden. Sebanyak tujuh surat kabar di Jakarta (*Kompas*, *Sinar Harapan*, *Merdeka*, *Pelita*, *The Indonesian Times*, *Sinar Pagi* dan *Pos Sore*).

Kisah pembredelan di era Soeharto terus berlanjut. Era 1980-an meminta korban antara lain: pada 1982 majalah *Tempo* ditutup untuk sementara waktu, ketika menulis peristiwa kerusuhan kampanye pemilu di Lapangan Banteng. Koran *Jurnal Ekuin*, dilarang terbit pada Maret 1983 oleh Kopkamtib akibat menyiarkan berita penurunan patokan harga ekspor minyak Indonesia yang merupakan informasi off the record. Korban berikutnya adalah majalah *Expo* (Januari 1984) setelah memuat serial tulisan mengenai Seratus Milyader Indonesia. Tulisan tersebut dinilai telah “melakukan penyimpangan terhadap ketentuan perundangan yang mengatur manajemen penerbitan pers”.

Televisi adalah sangat mudah untuk polisi. Penyiar negara, TVRI, disediakan monopoli berita dari Jakarta, dan bahkan Stasiun televisi independen, ketika mereka datang setelah tahun

1995, semua didukung oleh konglomerat berpengaruh, dan siap untuk memanipulasi cakupan mereka: pilihan cerita, waktu laporan, pilihan perspektif dalam gambar dan tanda kutip, tercermin status quo, memproduksi 'kontroversial produk' (Sen dan Hill 2000: 126-131).